

EKONOMI DAERAH

Banyak yang Purnabakti, Jumlah ASN di Pemkot Sukabumi Terus Menyusut

NERACA

Sukabumi - Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi yang memasuki masa purnabakti (pensiun), membuat jumlah ASN di kota moci tersebut alami penyusutan. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, setiap bulanya sekitar 11 sampai 20 ASN yang pensiun.

"Saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemkot Sukabumi terus menyusut, karena banyak yang pensiun," ucap Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, Kamis (29/9).

Asep mengungkapkan, terhitung dari Januari hingga September 2022 ini, sedikitnya 165 ASN yang masuk pensiun. Sehingga, kata Asep, tidak menutup kemungkinan jumlah ASN yang pensiun pada tahun ini akan meningkat, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 174 ASN.

"Ya, tahun ini sepertinya jumlah ASN yang pensiun akan meningkat. Dan saat ini jumlah total ASN yang ada saat ini sebanyak 3.887 orang," bebernya.

Sementara lanjut Asep, jumlah pengangkatan ASN yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah yang pensiun. Meskipun demikian, Pemkot Sukabumi tetap berupaya memaksimalkan SDM yang ada agar kinerja dapat maksimal.

"Kalau berbicara dengan kebutuhan, tentu saja masih kurang, namun kami memaksimalkan SDM yang ada," akunya.

Asep mengungkapkan, batasan usia pensiun untuk Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) dan pejabat fungsional ahli madya berada di 60 tahun, dan untuk yang lainnya batas usia pensiun sampai 58 tahun. "Rata-rata masa kerja ASN selama 25 tahun sampai 40 tahun," jelasnya.

Seperti yang diberitakan Neraca sebelumnya, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, meminta kepada pemerintah pusat untuk membuka lagi peluang calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerahnya. Keinginan tersebut tentunya, seiring dengan banyaknya ASN yang pensiun, sehingga mengurangi kebutuhan pegawai (ASN).

"Jika melihat kondisi jumlah ASN yang ada saat ini, tentunya sangat jauh dengan kebutuhan. Jadi tentu saja kami sangat kekurangan sekali," kata Fahmi. ● [arya](#)

Pemkab Muba Dukung BPN Berantas Mafia Tanah

NERACA

Palembang - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mendukung Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberantas mafia tanah dengan menjalankan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Pj Bupati Muba Apriyadi di Sekayu, Senin (26/9), mengatakan, persoalan sengketa lahan (tanah) hingga kini kerap terjadi disebabkan oleh adanya mafia tanah yang seringkali memanfaatkan situasi.

"Harus diakui saat ini mafia tanah masih bergentayangan, malahan bisa-bisa Pemkab jadi korban. Sesuai arahan Menteri ATR/BPN, Pemkab harus terlibat dalam pemberantasannya," kata Apriyadi.

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan. Selain di kalangan masyarakat, baik antar-keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar-pengaku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah).

Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah kini. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN meluncurkan PTSL.

PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. ● [ant](#)

PENGUMUMAN HASIL AKHIR LIKUIDASI PT PERSADA ALAM MAKMUR ("DALAM LIKUIDASI")

Likuidator perseroan terbatas PT Persada Alam Makmur ("Dalam Likuidasi") berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ("Perseroan") dengan ini mengumumkan hasil Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 28 September 2022, yang telah dinyatakan dalam Akta No. 198, tanggal 29 September 2022, yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Likuidator Perseroan tanpa syarat.
2. Menyetujui pelaksanaan dari pembagian kekayaan hasil likuidasi Perseroan kepada Para Pemegang Saham.
3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) dari seluruh tindakan penguasaan dan pengawasan Perseroan.
4. Menyetujui pengunduran diri serta membebaskan dan melepaskan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) Likuidator Perseroan dari seluruh tugas dan/atau tanggung jawab terhadap tindakan hukum yang telah dilakukan dalam proses likuidasi Perseroan.

Jakarta, 30 September 2022

PT Persada Alam Makmur ("Dalam Likuidasi")
Likuidator

Panen Raya Budidaya Asparagus Bank Muamalat : Perwakilan dari Bank Muamalat, Laznas BMM dan BIOPS Argotekno melakukan panen raya budidaya asparagus bersama para petani penerima manfaat di Lembang, Jawa Barat, baru-baru ini. Total asparagus yang dihasilkan dalam satu kali panen berkisar antara 4 – 5 kg dengan frekuensi panen sebanyak tiga kali dalam sepekan dan langsung dipasarkan sebagai pasokan untuk para pelaku bisnis olahan asparagus dan supermarket.

Hunian TOD Semakin Dilirik, Mendukung Mobilitas, Gaya Hidup Sehat dan Hemat Biaya

Jakarta - Awal September ini, pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hitungan pemerintah, kenaikan harga BBM ini akan menambah inflasi sebesar 1,8 persen dan membuat biaya hidup ikut membengkak. Hal ini berimbas pada pemilik kendaraan pribadi yang terbiasa menggunakannya untuk bekerja.

■ NERACA

Alhasil, ketimbang tetap memaksakan diri menggunakan kendaraan pribadi yang bisa memberatkan kantong, ada baiknya menggunakan transportasi publik seperti Transjakarta, LRT, MRT atau KRL.

Selain menghemat anggaran karena tidak harus membeli bensin yang harga lumayan tinggi, mengeluarkan biaya tol, parkir, kita juga bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Kemacetan yang parah dan polusi udara akibat padatnya kendaraan bermotor menjadi masalah klasik kota-kota besar, seperti di Jakarta. Mayke Kristika Antony Putri, Analis Perencanaan Subbidang Perkeretaapian, Kedepuan Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet RI mengatakan semakin kompleksnya kemacetan lalu lintas dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan akibat konsumsi BBM secara berlebih memerlukan solusi konkret yang dapat meminimalkan ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan pemanfaatan transportasi publik.

"Salah satu solusinya yaitu merancang pembangunan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD). Konsep TOD mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah dengan berjalan kaki ataupun bersepeda serta terintegrasi dengan transportasi publik ke seluruh kota," kata Mayke seperti dikutip dari portal setkab.go.id, Kamis (29/9).

TOD, Konsep Kawasan Berkelanjutan
Merujuk Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, Mayke mengatakan konsep kawasan TOD merupakan perancangan kota yang berkelanjutan untuk masyarakat dan dapat menjadi salah satu alternatif perancangan kota untuk pertumbuhan perekonomian daerah karena menggabungkan area hunian dengan komersial.

"Perkembangan kota yang berorientasi TOD berpotensi untuk mengurangi biaya transportasi rumah tangga dan mengatasi permasalahan lingkungan. Prinsip TOD menempatkan sarana komersial, permukiman, perkantoran, fasos dan fasos dalam jarak tempuh yang dekat. Beberapa negara di Amerika Latin, Jepang, Hongkong dan Singapura sudah menerapkan konsep hunian TOD," jelas Mayke.

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menjelaskan konsep TOD memiliki sejumlah manfaat seperti meningkatkan angka pemakaian transportasi publik sehingga tingkat kemacetan

daerah jika disertai pengembangan hunian terjangkau di kawasan TOD, karena akan mendorong terwujudnya budaya baru, yaitu budaya berjalan kaki, budaya transit, dan budaya yang membuka simpul-simpul di masyarakat.

Hal positif lainnya juga disampaikan oleh Monica Koesnovagril, Director Advisor Services Colliers Indonesia dalam Property Festival CNBC Indonesia, Juni lalu mengatakan, hunian TOD yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi seperti MRT, LRT, KRL membuat penghuninya bisa menghemat banyak waktu sehingga bisa memanfaatkan waktu yang biasanya habis di jalan untuk hal-hal yang lebih baik, seperti berkumpul bersama keluarga dan teman.

Pengamat Properti, Ali Tranghanda mengatakan, hunian TOD menjadi relevan saat ini karena membuat waktu dan aktivitas masyarakat yang berada di Jabodetabek untuk melakukan aktivitas.

Hunian Berbasis TOD Dilirik

Dalam TOD Forum, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Jakarta layak disebut sebagai pelopor kawasan berorientasi transit karena kebutuhan Jakarta dalam mengantisipasi kemacetan melalui perbaikan infrastruktur transportasi, adaptasi perubahan iklim melalui penerapan low emission zone, dan pengaturan dan perbaikan tata ruang/ tata bangunan melalui urban regeneration dengan integrasi hunian, tempat kerja dan ruang sosial.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menambahkan konsep TOD akan bernilai positif dan mendorong pendapatan

Pemkot Depok Ajak HIPMI Ikut Tekan Angka Inflasi

NERACA

Depok - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono berharap Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok Jawa Barat untuk dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi di kota tersebut.

"Jaringan HIPMI yang luar biasa, permodalan, ilmunya sehingga bisa menuntaskan masalah-masalah pengusaha yang ada di Kota Depok," kata Imam Budi Hartono disela-sela Muscab Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok di Depok, Selasa (27/9).

Menurut Imam kondisi ekonomi masyarakat yang sedang turun akibat kenaikan BBM, untuk itu kami mendorong HIPMI agar bisa bekerjasama mengatasi persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Misalnya saja agar inflasi khususnya di Kota Depok ini bisa ditekan sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kita diberi batas ambang maksimal inflasi di bawah 5. "Depok sendiri angka inflasinya saat ini berada di 4,57, semoga tidak naik lagi," katanya.

Dikatakannya laju inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Imam berharap inflasi rendah atau stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Imam mengakui terdapat persamaan persepsi yang telah terbangun antara Pemkot Depok dengan HIPMI dalam membangun perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok, Herik Yosiswardinata terpilih sebagai Ketua HIPMI Depok baru periode 2022-2025 yang terpilih secara aklamasi. ● [ant](#)

Pemohon Penerbitan Paspor di Serang Meningkat

NERACA

Tangerang - Kantor Keimigrasian Kelas I Non TPI Serang, Banten mencatat pemohon penerbitan paspor sepanjang tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seiring dengan adanya kelonggaran dari sejumlah negara tujuan atas melandainya pandemi COVID-19.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Keimigrasian Kelas I Non TPI Serang Yusup Rinjani melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Selasa (27/9), mengatakan bahwa peningkatan itu terlihat dari jumlah pemohon harian yang meningkat 80 persen.

"Permohonan paspor meningkat sebesar 80 persen dibandingkan 2021, dari 10 pemohon menjadi 122 pemohon per hari dari 150 kuota per hari," katanya pula.

Di menanggapi, jumlah peningkatan penerbitan paspor tercatat mulai dari bulan Januari hingga Agustus 2022 yang menyentuh di angka 17.760 pemohon.

"Jumlah permohonan paspor 17.760 dari bulan Januari hingga Agustus 2022. Sedangkan di tahun 2021 hanya sebanyak 5.029 pemohon," ujarnya lagi.

Dia mengatakan, permohonan paspor ini didominasi oleh paspor biasa dan paspor elektronik dengan ketentuan sesuai aturan pembuatan paspor selesai selama tiga hari.

"Paspor yang bisa bebas visa itu paspor elektronik, karena disampulnya terdapat chip, tapi bebas visa hanya untuk beberapa negara bukan untuk semua negara," katanya pula. ● [ant](#)

Kementerian PUPR Tata Kawasan Kedaung di Tangerang

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menata Kawasan Kedaung di Kota Tangerang, Banten, dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni dan produktif.

"Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/9).

Sesuai amanat Major Project RPJMN 2020-2024, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus melakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni dan produktif. Salah satunya melalui program Peningkatan Kualitas Permukiman (PKP) Kumuh Skala Kawasan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). ● [ant](#)

Ontrog Kantor BPN Kabupaten Sukabumi, Mahasiswa Minta Tuntaskan Konflik Agraria

NERACA

Sukabumi - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam wadah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bersama Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi, melakukan aksi unjuk rasa di depan di depan ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi pada Rabu (28/9).

Aksi itu sempat memanas karena adanya saling dorong antara mahasiswa dan petugas Polres Sukabumi Kota.

Hal itu, terjadi lantaran para mahasiswa merasa geram kepada petugas ATR/BPN Kabupaten Sukabumi yang tidak kunjung memenuhi mereka.

Dalam orasinya, Ketua Umum PC IMM Sukabumi Raya, Yusuf Supardin mengatakan Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di pulau Jawa dan Bali, tentunya memiliki bidang tanah yang luas.

Namun faktanya, sebut dia, ketimpangan hak atas tanah di Sukabumi sering terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perkebunan di Sukabumi yang mencapai 63 perkebunan HGU, HGB dan HGP.

Jika dilihat di lapangan, sebut dia, banyak perkebunan yang terindikasi sudah tidak aktif dan tidak beroperasi sesuai dengan peruntukannya.

"Seharusnya ATR/BPN Kanta Kabupaten Sukabumi mencabut ijin HGU dan

HGB-nya," tandasnya. Pada kesempatan ini, dalam suasana Hari Tani Nasional ke 62 tahun, IMM, KBM dan petani menuntut agar Kantor Pertanahan menjalankan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan menuntutkan konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, serta meminta segera menyelesaikan konflik agraria pasca redistribusi lahan tahun 2020 di wilayah Kecamatan Warungkiara.

"Segera keluarkan SK tanah terlantar terhadap perkebunan yang sudah terindikasi tidak beroperasi atau terlantar dan segera cabut izin HGU, HGB serta HGP di Kabupaten Sukabumi," tuntutnya. Bukan hanya itu, mere-

ka juga mendesak Ketua GTRA Kabupaten Sukabumi dalam hal ini Bupati Sukabumi untuk segera membuat tim khusus penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada BPN Kabupaten Sukabumi, Mulyo Santoso didampingi Kepala Seksi Penataan Hak Pertanahan dan Pendaftaran Tanah pada BPN Kabupaten Sukabumi, Jumaliyanto mengatakan, pada dasarnya BPN Kabupaten Sukabumi telah menyiapkan positif soal aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut di halaman ATR/BPN Kanta Kabupaten Sukabumi.

Pada kesempatan tersebut ia menjelaskan, terdapat

at beberapa hal yang dibahas soal program strategis nasional. Diantaranya permasalahan PTSL, pengadaan tanah jalan tol ataupun redistribusi tanah yang merupakan bagian untuk kepentingan dari petani dan penggarap tanah.

"Kami mengakui konflik reforma agraria ini merupakan permasalahan yang kompleks.

Apalagi Kabupaten Sukabumi memiliki lahan terluas kedua di wilayah Jawa-Bali setelah daerah Banyuwangi," katanya.

Pihaknya mengaku, sebenarnya ATR/BPN Kabupaten Sukabumi sudah melakukan komunikasi soal reforma agraria ini. Bahkan, bukan hanya membagi-bagikan tanah. ● [ron](#)



PERTANIAN HIDROPONIK BAYAM BRAZIL : Petani hidroponik Rina Tri Wahyuni merawat tanaman bayam brazil di Azalea Farm, Kebonbimo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (29/9/2022). Selain dijual dengan harga Rp5 ribu per 200 gram, bayam brazil yang ditanam dengan sistem hidroponik itu juga dijual menjadi minuman sari sayur dan buah yang dijual dengan harga Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per botol dan telah memenuhi permintaan pasar ke kawasan Jabodetabek.